BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Kurikulum Merdeka

1. Pengertian Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum adalah sebagai satu sistem penganturan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematik dalam rangka menjadikan kesuksesan tujuan kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan segala aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Manajemen kurikulum berisi dengan bagaimana kurikulum direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh siapa, kapan dan dalam lingkup mana. Manajemen kurikulum juga berhubungan dengan Kebijakan siapa yang diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kurikulum. Rusman. (2009)

Manajemen kurikulum merupakan kurikulum sebagai program pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam seluruh aspek aktivitas pendidikan. Mengingat pentingnya kedudukan kurikulum di dalam pendidikan dan perkembangan kesejahteraan peserta didik, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan simbol yang kokoh dan kuat. Salah satu simbol yang memperkuat pondasi kurikulum adalah landasan manajerial, sehingga manajemen kurikulum perlu dikembangkan dalam merancang kurikulum baru atau mengembangkan kurikulum yang sudah dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. (Maulid Datun, 2024)

Dalam Al-Qur'an**,** istilah manajemen kurikulum tidak disebutkan secara eksplisit karena merupakan konsep yang berkembang dalam ilmu pendidikan modern. Namun, nilai-nilai yang menjadi dasar manajemen kurikulum, seperti perencanaan (at-takhtit), pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, amanah, dan musyawarah**,** banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, manajemen kurikulum dalam perspektif Al-

Qur'an dapat dipahami sebagai proses mengelola seluruh kegiatan pendidikan secara terencana, teratur, dan bertanggung jawab agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan landasan adalah:

1. Perencanaan (Planning)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok..." (QS. Al-Hasyr: 18)

Ayat ini menunjukkan pentingnya perencanaansebagai dasar dalam setiap kegiatan, termasuk penyusunan dan pengelolaan kurikulum

2. Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۗ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:

"...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..."

(QS. Ali 'Imran: 159).

Ayat ini menjadi dasar bahwa penyusunan dan pengembangan kurikulum hendaknya dilakukan melalui musyawarah dengan berbagai pihak, seperti kepala madrasah, guru, komite, dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Amanah dan Profesionalisme

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS. An-Nisa': 58).

Ayat ini menegaskan bahwa pengelolaan kurikulum harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi serta penuh tanggung jawab.

2. Pengertian Kurikulum Merdeka

Kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu *currere* yang berarti "berlari" atau "lintasan yang harus ditempuh oleh seorang pelari". Istilah *curriculum* pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Romawi Kuno untuk menggambarkan jarak atau lintasan yang harus ditempuh seorang pelari dari garis start hingga garis finis (Baharuddin, 2021). Dalam perkembangan ilmu pendidikan, makna tersebut kemudian diadaptasi menjadi serangkaian pengalaman belajar yang harus ditempuh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara terminologis, kurikulum merupakan seperangkat rencana mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta proses pembelajaran yang disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan. Menurut Pasal 1 angka 19Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah *"seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu."*(UU Nomor 20 Tahun 2003.pdf, t.t.)

Kurikulum harus selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sudah berkembang dan belajar membosankan tanpa perubahan, bukankah tugas kita adalah mempersiapkan siswa kita untuk era baru, era yang sama sekali berbeda dari dulu. Kurikulum harus berubah agar kita bisa mempersiapkan generasi masa depan dan menatap masa depan. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, pendidikan mengarahkan segala daya kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai tingkat keamanan dan kebahagiaan

yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.(Yudianto dkk 2022)

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum pembelajaran internal yang beragam yang isinya dioptimalkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk mempelajari konsep dan membangun kompetensi. Untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa, guru dapat memilih berbagai alat pengajaran Berdasarkan isu-isu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, sebuah proyek dikembangkan untuk meningkatkan prestasi siswa Pancasila. Karena hasil pembelajaran tertentu tidak berorientasi proyek, tidak terkait dengan mata Pelajaran. Kurikulum Merdeka merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Makarim yang memberikan kebijakan Perencanaan konsep (Nasution & Pd, t.t.)

Menurut S. Nasution, kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga Pendidikan beserta staf pengajaran. Menurut pandangan tradisional, kurikulum dianggap sebagai kumpulan pelajaran yang harus diikuti oleh siswa di sekolah, sehingga proses belajar di sekolah seringkali dianggap hanya berfokus pada buku teks yang telah ditetapkan sebagai bahan ajar. Sebaliknya, pandangan modern melihat kurikulum sebagai lebih dari sekadar rencana pembelajaran, kurikulum disini dianggap sebagai sesuatu yang benar benar terjadi dalam proses pendidikan di sekolah

Kurikulum merupakan perangkat yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Ide kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka belajar dicetuskan oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Salah satu konsep dalam kurikulum pembelajaran mandiri adalah menuntut siswa untuk mandiri. setiap siswa memiliki kebebasan untuk mengakses ilmu pengetahuan baik dari pendidikan formal maupun informal, kemandirian. Dengan kebijakan afirmatif yang ditujukan untuk siswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil

pengembangan kurikulum pembelajaran mandiri membantu pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Karakter siswa akan dibentuk dalam beberapa cara di luar kelas, termasuk mereka keberanian menyuarakan pendapat dalam diskusi, kemampuan bergaul dengan orang lain, dan kompetensinya sebagai siswa. Hal ini mendorong kreativitas di kalangan siswa dan akan terwujud di bawah pengawasan guru. Disadari pula bahwa guru harus mampu mengembangkan konsep pembelajaran yang baru. bagi siswanya. Pembentukan kemandirian berpikir adalah ide di balik kurikulum merdeka belajar. Guru menentukan kebebasan berpikir. Akibatnya, guru memainkan peran penting dalam mendorong keberhasilan pendidikan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu rencana pembelajaran yang disusun oleh suatu 13 instansi pendidikan untuk dijadikan sebagai acuan guna mencapai tujuan pendidikan pembelajaran. Manajemen kurikulum adalah bentuk usaha atau upaya bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dalam usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar yang didalamnya terdapat penerapan atau implementasi dari fungsi manajamen berupa perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi.

3. Prinsip Pembelajaran Dalam Kurikulum Merdeka

Kemunculan kurikulum merdeka belajar menunjang tersebarluasnya pendidikan di Indonesia secara merata dengan kebijakan afirmasi yang dibuat oleh pemerintah terhadap peserta didik yang berada didaerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kurikulum Merdeka menurut jurnal dari (Nasution &Pd, t.t) mencakup tiga tipe kegiatan pembelajaran sebagai berikut:

a. Pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya.

b. Pembelajaran kokurikuler berupa projekpenguatan Profil Pelajar Pancasila,berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum.
c. Pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik. Satuan pendidikan menerjemahkan Capaian Pembelajaran dengan menyusun kurikulum operasional dan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar pelajar dan karakteristik satuan pendidikan masing-masing.

Muatan capaian pembelajaran dapat dikelola pendidik sebagai mata pelajaran tersendiri, tematik, integrasi, atau sistem blok. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam satutahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler/mingguan.

Pelaksanaan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka merupakan siklus yang melalui tiga tahapan berikut:

a. Asesmen diagnostic

   Yakni guru melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran murid. Asesmen umumnya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang sebaiknya digunakan.

b. Perencanaan

   Yakni guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostic serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan.

c. Pembelajaran

   Yakni selama proses pembelajaran, guru akan mengadakanasesmen formatif secara berkala untuk mengetahui progress pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran.

Menurut Kemendikbud atau Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang ditulis dalam Panduan 21 Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah, terdapat beberapa tahapan dalam manajemen kurikulum merdeka belajar, yaitu:

a. Perencanaan Kurikulum Merdeka

Perencanaan merupakan upaya membuat kegiatan agar lebih fokus dan terarah sehingga kegiatan yang ingin dilaksanakan mendapatkan hasil yang memuaskan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang baik memerlukan perencanaan pembelajaran yang baik juga, oleh sebab itu keberhasilan peserta didik ditentukan oleh perencanaan yang buat oleh guru.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan hal yang harus dilakukan dengan sistematis mengenai perkembangan peserta didik sehingga dapat mewujudkan tujuan pembelajaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Dalam perencanaan pembelajaran kurikulum merdeka ada beberapa langkah yaitu:

1. Memahami Capaian Pembelajaran (CP) Struktur kurikulum merdeka menggunakan istilah capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. CP dalam kurikulum merdeka merupakan keterampilan belajar yang harus dimiliki secara bertahap oleh setiap peserta didik, hal ini berarti bahwa kurikulum Merdeka mengatur pembelajaran disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik.
2. Merumuskan Tujuan Pembelajaran Dalam tahap ini pendidik cukup merancang tujuan-tujuan belajar yang lebih operasional dan konkret.
3. Menyusun Alur Tujuan Pembelajaran Alur tujuan pembelajaran sebenarnya memiliki fungsi yang serupa dengan yang biasa kita kenal sebagai silabus, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan

pembelajaran dan asesmensecara garis besar untuk jangka waktu satu tahun. Oleh karena itu dapat menggunakan alur tujuan pembelajaran yang dapat diperoleh pendidik dengan merancang sendiri dengan menggunakan CP.

4. Merencanakan Pembelajaran dan Asesmen Rencana pembelajaran ini dirancang untuk memandu guru melaksanakan pembelajaran sehari-hari untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran.

b. Implementasi Kurikulum Merdeka

Pelaksanaan kurikulum merdeka merupakan kegiatan perwujudan dari modul ajar yang memuat keseluruhan proses belajar pembentukan kompetensi dan karakter siswa. Pembelajaran yang dilaksanakan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dengan demikian pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi membutuhkan asesmen yang bervariasi dan berkala.

Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyasa mengatakanbahwa implementasi kurikulum mereka ini terdiri dari tiga struktur penerapan pembelajaran yaitu kegiatan intrakurikuler, projek penguatan profil pelajar pancasila, dan ekstrakurikuler

1. Intrakurikuler

   Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah secara langsung sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

2. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila P5 merupakan kegiatan pembelajaran yang menerapkan lintas disiplin ilmu melalui proses mengamati dan memikirkansolusi terhadap permasalahan yang ada dilingkungan sekitarnya.

3. Ektrakurikuler Kegiatan peserta didik yang dilakukan diluar jam wajib belajar peserta didik yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan, wawasan, serta mengembangkan minat dan bakat peserta didik.

c. Evaluasi Kurikulum Merdeka

Evaluasi merupakan proses penilaian sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang akan menghasilkan kumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur dan mengetahui tercapai atau tidaknya program yang telah direncanakan oleh sekolah tersebut.

Asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang kecapaian tujuan pembelajaran. Maka dari itu pendidik dianjurkan untuk melakukan asesmen-asesmen yakni Formatif dan Sumatif

1. Asesmen Formatif

   Adalah asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen ini juga bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembalajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yng mereka hadapi, dan juga untuk mendapatlan informasi perkembangan peserta didik.

2. Asesmen Sumatif

   Asesmen yang digunakan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran, sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. ika diperlukan. Pada akhir proses pembelajaran, guru juga bisa melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran.

4. Dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Satuan Pendidikan

a. Platform Merdeka Mengajar

Menyediakan beragam topik pelatihan tentang Kurikulum Merdeka hingga berbagai referensi Perangkat Ajar (Panduan, Capaian Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran) serta sumber belajar lainnya yang bisa diakses secara mandiri maupun kelompok kapanpun dan dimanapun.

b. Seri Webinar (dari Pusat dan Daerah)

Kemendikbudristek dan Unit Pelaksana Teknis di daerah menyelenggarakan seri webinar implementasi Kurikulum Merdeka untuk berbagi praktik baik maupun informasi terkini bagi guru, kepala satuan pendidikan dan unsur pemangku Pendidikan

c. Komunitas Belajar: Komunitas Belajar dapat memfasilitasi proses refleksi, belajar, dan berbagi bersama dalam mempelajari dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Komunitas belajar dapat dibentuk bersama-sama oleh pendidik pada tingkat Satuan Pendidikan, Tingkat Daerah maupun Komunitas Daring.

d. Narasumber Berbagi Praktik Baik (Rekomendasi dari Pusat)

Narasumber berasal dari pendidik yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan telah diseleksi. Narasumber berbagi praktik baik dapat dihubungi melalui Platform Merdeka Mengajar.

e. Mitra Pembangunan

Organisasi/Lembaga/ Dunia Usaha/ Dunia Industri yang secara mandiri dan sukarela mendukung proses belajar komunitas di tingkat daerah dan/atau tingkat satuan pendidikan.

5. Konsep Kurikulum Merdeka

Konsep kurikulum merdeka belajar merupakan terbentuknya kemerdekaan dalam berpikir. Kemerdekaan berpikir ditentukan oleh guru Artinya guru menjadi tonggak utama dalam menunjang keberhasilan dalam pendidikan. Pada era digitalisasi saat ini perkembangan teknologi mempengaruhi kualitas dalam pendidikan. Dimana dalam setiap aktivitas yang dilakukan baik guru maupun peserta didik tidak terlepas dari perangkat yang berbasis digital.

Konsep pendidikan kurikulum merdeka belajar mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta penguasaan teknologi. Nah, Melalui konsep ini peserta didik diberikan kebebasan dalam berpikir untuk memaksimalkan pengetahuan yang harus ditempuh. Konsep kurikulum abad 21 menuntut peserta didik harus mandiri dalam memperoleh ilmu baik dalam pendidikan formal maupun non formal. Kebebasan yang diterapkan dalam konsep abad 21 tersebut akan memberikan peluang kepada peserta didik untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu melalui kegiatan literasi, mengembangkan bakat melalui keterampilan dan hal-hal positif yang menunjang perkembangan setiap peserta didik

Konsep kurikulum merdeka belajar ini sudah sewajarnya diterapkan secara merata di instansi pendidikan Indonesia saat ini. Selain berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik, konsep ini juga akan mempermudah guru dalam menerapkan proses pembelajaran yang inovatif. Beban yang ditanggung guru selama ini dapat dipecahkan melalui kurikulum merdeka belajar. Selain itu, konsep kurikulum merdeka belajar juga akan menjadi solusi dalam menjawab tantangan pendidikan pada era digitalisasi seperti sekarang ini. Nah untuk itu, kita selaku kaum akademisi harus mampu menjadi garda terdepan dalam menggerakkan kurikulum merdeka belajar tersebut diranah pendidikan Indonesia saat ini. (Nasution & Pd, t.t.)

B. Manajemen Berbasis Sekolah

1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen merupakan hal yang paling dan strategis dalam suatu organisasi. Implikasi dari era otonomi daerah menimbulkan reformasi dalam bidang dan sektor pendidikan yang menyebabkan perubahan pengelolaan di sekolah, struktur organisasi, tugas dan fungsi sekolah berubah kearah yang lebih mandiri, Sekolah kini berusaha menata diri, karena sekolah memiliki kemandirian dengan kewenangan luas (*ISMAIL541-944-1-SM.pdf*, t.t.)

Secara bahasa, Manajemen Berbasis Sekolah berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses mengunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat untuk menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut, manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai pengunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah dalam proses pengajaran atau pembelajarann. Istilah Manajemen Berbasis Sekolah ini masih merupakan permasalahan yang masih hangat dibicarakan oleh aktifis dalam bidang pendidikan, baik itu, guru, orangtua, kepala sekolah, stakeholders, pakar pendidikan dan lain-lain (Aliyyah dkk., 2021)

Manajemen Berbasis Sekolah menjadi model manajemen sekolah yang memberikan otonomi yang cukup besar kepada sekolah dalam mendorong pengambilan keputusan dengan melibatkan partisipasi langsung dari seluruh warga sekolah, seperti guru, siswa, kepala sekolah, pegawai sekolah, orangtua siswa dan masyarakat sekitar dalam upaya meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan maksud agar madrasah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan(Mulyadi dkk., 2021)

Pada sistem MBS madrasah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggung jawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. MBS juga merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada madrasah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi siswa. Hal ini juga berpotensi untuk meningkatkan kinerja staf, menawarkan partisipasi langsung kepada kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terhadap pendidikan.

Pengertian MBS sebagai suatu konsep yang menempatkan kekuasaan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan diletakkan pada tempat yang paling dekat dengan proses belajar mengajar. Kewenangan terhadap pembelajaran di serahkan kepada unit yang paling dekat dengan pelaksanaan proses pembelajaran itu sendiri yaitu madrasah. Di samping itu untuk memberdayakan madrasah agar dapat melayani masyarakat secara maksimal sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut.(Asyibli dkk., 2025)

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah menuntut adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan pendidikan dari sistem yang bersifat sentralistik menuju sistem desentralistik. Melalui paradigma tersebut, sekolah diberikan keleluasaan untuk menyusun program kerja, mengembangkan kurikulum operasional, mengelola sumber daya manusia, mengoptimalkan pembiayaan, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan. Kewenangan tersebut tetap mengacu pada Standar Nasional

Pendidikan dan kebijakan pemerintah sehingga pelaksanaan MBS tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kemendikbudristek, 2022).

Dalam implementasinya, Manajemen Berbasis Sekolah menekankan pentingnya partisipasi seluruh warga sekolah dan masyarakat. Kepala madrasah berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu mengoordinasikan seluruh sumber daya secara efektif, sedangkan guru berperan sebagai pelaksana pembelajaran yang profesional dan inovatif. Komite madrasah, orang tua, serta masyarakat berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan melalui pemberian masukan, pengawasan, maupun dukungan terhadap berbagai program madrasah. Sinergi antarunsur tersebut diharapkan mampu menciptakan budaya organisasi yang kondusif, demokratis, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan (Nurkolis, 2019).

Lebih lanjut, penerapan Manajemen Berbasis Sekolah memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasional, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, serta mengembangkan program yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolah. Fleksibilitas tersebut hanya dapat diwujudkan apabila sekolah memiliki tata kelola yang efektif melalui penerapan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah, seperti kemandirian, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program. Dengan demikian, MBS menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik (Kemendikbudristek, 2022).

2. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah Adalah pendekatan yang memberikan otonomi lebih kepada sekolah untuk mengelola segala aspek pendidikan.

Dengan kata lain, MBS memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengambil keputusan yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan lokalnya.

Beberapa prinsip dasar dari MBS antara lain:

a. Otonomi Sekolah: Memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menentukan kebijakan, merancang kurikulum, dan mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal.
b. Partisipasi Stakeholder: MBS melibatkan berbagai pihak, seperti guru, orang tua, dan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan.
c. Akuntabilitas: Sekolah bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai dalam implementasi kebijakan.
d. Transparansi: Semua keputusan yang diambil di sekolah harus dapat diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk masyarakat dan orang tua siswa.

C. Wujud Penerapan Kurikulum Merdeka Melalui Pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah

Penerapan KurikulumMerdeka merupakan inovasi pendidikan yang menekankan pada fleksibilitas pembelajaran, penguatan karakter, dan pengembangan kompetensi peserta didik. Esensi utama dari kurikulum ini adalah memberi ruang kebebasan bagi satuan pendidikan dan guru untuk menyusun pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik dan berorientasi pada penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. Dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah memiliki otonomi untuk mengelola kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik, guru, dan lingkungan sekitar.

Pendekatan ini sangat relevan jika dikolaborasikan dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu model pengelolaan pendidikan yang menekankan pada otonomi sekolah, partisipasi masyarakat, dan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Wujud Penerapan Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Pendekatan Berbasis Sekolah yang sesuai dengan observasi dilapangan menurut {Suyatno dkk, 2022) yakni:

1. Penyusunan Kurikulum Operasional Sekolah (KOS)

   Sekolah diberi kewenangan menyusun KOS berdasarkan prinsip diferensiasi. Kurikulum tidak lagi bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan visi-misi sekolah, karakteristik siswa, dan potensi lingkungan. Ini selaras dengan prinsip MBS yang menempatkan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan akademik.
2. Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

   Kurikulum Merdeka mengenalkan P5 sebagai wahana pembentukan karakter dan pengembangan soft skills peserta didik. Sekolah memiliki kebebasan memilih tema dan merancang kegiatan yang relevan, seperti kewirausahaan lokal, pelestarian budaya, atau pengelolaan lingkungan hidup. MBS mendorong keterlibatan aktif guru, siswa, dan masyarakat dalam pelaksanaan program ini.
3. Pemberdayaan Guru sebagai Penggerak Kurikulum

   Guru tidak lagi sekadar pelaksana, tetapi menjadi perancang pembelajaran yang reflektif dan inovatif. Melalui pelatihan, supervisi, dan kolaborasi tim, sekolah menciptakan ekosistem pembelajaran yang merdeka, kreatif, dan adaptif.
4. Keterlibatan Komite Sekolah dan Masyarakat

   Penerapan Kurikulum Merdeka melalui MBS mengharuskan adanya keterlibatan pihak luar seperti orang tua, tokoh masyarakat, dan dunia usaha. Mereka berkontribusi dalam merancang P5, menjadi narasumber, hingga menyediakan fasilitas penunjang kegiatan belajar.
5. Evaluasi dan Perbaikan Berbasis Data

   MBS juga menekankan pentingnya school-based evaluation dalam proses perencanaan dan perbaikan pembelajaran. Sekolah menggunakan hasil asesmen formatif dan sumatif sebagai dasar untuk merefleksi dan menyempurnakan pelaksanaan Kurikulum Merdeka

D. Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	**Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar** Alimuddin (2023)	Sama-sama membahas implementasi Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan serta mengkaji proses perencanaan, pelaksanaan, dan kendala implementasi kurikulum.	Penelitian Alimuddin dilakukan pada jenjang sekolah dasar dengan fokus pada proses pembelajaran di kelas, sedangkan peneliti menitikberatkan implementasi Kurikulum Merdeka melalui pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang melibatkan pengelolaan kelembagaan secara menyeluruh.
2.	**Manajemen Sekolah dalam Implementasi Kurikulum** Irmayanti, Sriyanto, dkk. (2023)	Sama-sama mengkaji implementasi Kurikulum Merdeka yang dipengaruhi oleh fungsi-fungsi manajemen sekolah, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.	Penelitian Irmayanti dkk. lebih berorientasi pada fungsi manajemen sekolah secara umum, sedangkan peneliti secara khusus menggunakan pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai strategi implementasi Kurikulum Merdeka.
3.	**Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pengelolaan Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 8 Lubuklinggau** Supriyanti, dkk. (2024)	Sama-sama membahas implementasi Kurikulum Merdeka melalui pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan meninjau aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.	Penelitian Supriyanti dkk. dilakukan di sekolah menengah pertama negeri (SMP), sedangkan penelitian ini dilakukan di MTs Negeri 15 Jombang yang memiliki karakteristik sebagai lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Kementerian Agama, sehingga memiliki budaya organisasi, struktur pengelolaan, serta kebijakan kurikulum yang berbeda

Berdasarkan hasil telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa implementasi Kurikulum Merdeka telah banyak dikaji dari berbagai perspektif. Penelitian Alimuddin (2023) berfokus pada implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang sekolah dasar dengan menitikberatkan pada proses pembelajaran di kelas, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan kendala yang dihadapi guru. Penelitian Irmayanti, Sriyanto, dkk. (2023) mengkaji implementasi Kurikulum Merdeka berdasarkan fungsi-fungsi manajemen sekolah, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Sementara itu, penelitian Supriyanti, dkk. (2024) secara khusus mengkaji implementasi Kurikulum Merdeka melalui pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang sekolah menengah pertama dengan menekankan aspek pengelolaan kurikulum di lingkungan sekolah.

Meskipun memiliki kesamaan dalam mengkaji implementasi Kurikulum Merdeka, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan pada konteks lembaga, fokus kajian, dan ruang lingkup analisis. Belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengkaji implementasi Kurikulum Merdeka melalui pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah pada madrasah negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dengan karakteristik tata kelola pendidikan Islam. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek implementasi kurikulum atau fungsi manajemen sekolah secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai keterkaitan antara penerapan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah dengan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan mengkaji Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah di MTsN 15 Jombang secara lebih komprehensif. Penelitian ini menganalisis wujud penerapan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi madrasah dalam mengoptimalkan implementasi Kurikulum Merdeka melalui tata kelola madrasah yang efektif, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.